

KIA9_APJK_025

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL RATIO, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Ravincka Soraya Novyanti Hutasoit¹⁾, Fanny Anggraeni²⁾

¹⁾Trisakti School of Management
email: ravincka.201870188@gmail.com

²⁾Trisakti School of Management
email: fanny@stietrisakti.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of corporate governance, financial ratios, and corporate social responsibility on tax avoidance. The independent variables of this research are independent commissioner, audit committee, corporate social responsibility, return on asset, sales growth, and firm size. The dependent variable of this research is tax avoidance. The data used in this research was taken from the financial reports and annual reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. The number of samples of manufacturing companies in this research are 59 companies with a total of 177 research data were selected using the purposive sampling method. The data in this research was processed using SPSS 25. This research was analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this research show that independent commissioner, corporate social responsibility, return on asset, and firm size have no effect on tax avoidance. While the audit committee and sales growth have an influence on tax avoidance. The results of this study are expected to provide insight to the government and also companies regarding tax avoidance actions that may be carried out by companies.

Keywords: Tax Avoidance, Audit Committee, Sales Growth, Corporate Social Responsibility.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya mencapai tujuannya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional, dan perekonomian masyarakat (Fauzan *et al.*, 2019).

Meskipun jumlah wajib pajak meningkat, terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan pembayaran pajak. Salah satunya disebabkan karena kurangnya kepatuhan terhadap pembayaran pajak karena masyarakat maupun perusahaan masih menganggap pajak sebagai beban, sehingga masyarakat atau perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Fauzan *et al.*, 2019).

Beban pajak yang dianggap memberatkan bagi suatu perusahaan mengakibatkan terjadinya upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara hukum yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dianggap sebagai masalah yang unik, karena hal tersebut sebenarnya diperbolehkan namun di sisi lain tindakan tersebut juga tidak diinginkan (Fauzan *et al.*, 2019).

Penghindaran pajak dapat membawa dampak buruk bagi perusahaan seperti sanksi yang akan dikenakan dan juga reputasi perusahaan akan terlihat buruk di mata masyarakat. Penghindaran pajak juga dianggap sebagai tindakan yang tidak mendukung peraturan perpajakan karena dapat menyebabkan kerugian besar yang dialami negara yang dimana akan berdampak bagi kesejahteraan dan kemakmuran Negara Indonesia.

Berdasarkan berita dari Suryani Suyanto & Associates yang terdapat dalam www.ssas.co.id menyatakan bahwa pada tahun 2020, dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Justice in the time of Covid-19* disebutkan bahwa tindakan penghindaran pajak dapat merugikan Negara Indonesia sebesar Rp68,7 triliun per tahun. Hal ini disebabkan oleh praktik perusahaan multinasional yang berusaha mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak (*tax heaven*) yang bertujuan untuk tidak melaporkan berapa banyak laba sebenarnya yang dihasilkan di negara tempat berbisnis, sehingga perusahaan akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, tanggung jawab sosial perusahaan, return on asset, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang serta faktor-faktor yang telah diuraikan maka judul penelitian ini adalah “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL RATIO, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”.

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS TEORI AGENSI

Teori agensi yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan wewenang dalam mengambil keputusan (Fauzan *et al.*, 2019). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan ada beberapa biaya terkait hubungan agensi ini, yaitu biaya pemantauan (*monitoring cost*) yang dikeluarkan membatasi aktivitas serta tindakan-tindakan agen yang menyimpang, biaya ikatan (*bonding cost*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan prinsipal, dan biaya penurunan (*the residual loss*) yaitu biaya penurunan kemakmuran setara nilai mata uang yang dialami oleh prinsipal yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (Triwuyono, 2018).

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa terdapat dua aspek masalah yang terdapat dalam masalah keagenan yaitu *adverse selection* yang mengacu pada kondisi dimana prinsipal tidak dapat memastikan apakah kemampuan agen telah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan *moral hazard* yang mengacu pada tindakan agen yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dengan prinsipal (Triwuyono, 2018). Hubungan teori agensi dalam penelitian ini digambarkan melalui perbedaan kepentingan antara otoritas pajak sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak (Wiratmoko, 2018).

Pemerintah mengharapkan perusahaan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengharapkan penghasilan yang maksimal dari pembayaran pajak. Di sisi lain, perusahaan sebagai pihak yang membayar pajak berharap tetap dapat memperoleh laba yang signifikan namun dengan tingkat pembayaran pajak yang rendah, sehingga perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk menghindari pembayaran pajak (Wiratmoko, 2018).

PENGHINDARAN PAJAK

Praktik penghindaran pajak perusahaan terjadi karena adanya perbedaan pemahaman mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dimana pemerintah menganggap pajak sebagai salah satu sumber terbesar untuk pendanaan kepentingan negara, sementara perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan yang diperolehnya, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Wiratmoko, 2018).

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak namun tidak melanggar peraturan perpajakan secara hukum. Penghindaran pajak dipandang sebagai suatu fenomena yang cukup unik, karena penghindaran pajak pada dasarnya diperbolehkan namun di sisi lain pemerintah tidak menginginkan perusahaan melakukan tindakan tersebut (Fauzan *et al.*, 2019).

Permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak terlepas dari sistem perpajakan yang di Indonesia, yakni *self assessment system*. Sistem ini memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar atau menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga memberikan peluang untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan (Wiratmoko, 2018).

KOMISARIS INDEPENDEN DAN PENGHINDARAN PAJAK

Salah satu komponen dari tata kelola perusahaan yang baik adalah adanya komisaris independen dalam perusahaan. Komisaris independen bertugas untuk melakukan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan dan memastikan laporan keuangan agar lebih objektif (Wiratmoko, 2018). Dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2017 Pasal 19 disebutkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki dewan komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, dengan proporsi komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Tugas komisaris independen ialah memastikan bahwa operasional berlangsung secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa hasil laporan keuangan terlepas dari kecurangan serta berperan sebagai penengah apabila terdapat perselisihan antara manajemen internal perusahaan (Pratomo dan Rana, 2021). Tujuan yang ingin dicapai dengan kehadiran komisaris independen adalah terciptanya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab dengan mewujudkan dan mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Pandia *et al.*, 2019).

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari pihak luar yang tidak memiliki ikatan kepentingan terhadap perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar dewan komisaris independen dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak (Rani, 2017). Hasil penelitian Lionita dan Kusbandiyah (2017), Rani (2017), Lubis (2020), Pratomo dan Rana (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H1: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KOMITE AUDIT DAN PENGHINDARAN PAJAK

Komite audit memiliki wewenang untuk mengakses informasi mengenai sumber daya yang terdapat dalam perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya (Pandia *et al.*, 2019). Dalam menjalankan tugasnya, komite audit akan menjalin hubungan dengan direksi, manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Semua anggota komite audit akan mendapatkan pemahaman mengenai tanggung jawab anggota, bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, kegiatan operasional perusahaan serta risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Pandia *et al.*, 2019). Komite audit dapat mencegah

tindakan manajemen yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan dan dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019).

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, komite audit memiliki peran serta tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan operasional sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menjalankan usahanya dengan sesuai dengan etika bisnis dan secara efektif mengawasi jalannya perusahaan tanpa adanya perbedaan kepentingan dan kecurangan (Suryani, 2020).

Tingginya jumlah komite audit dalam perusahaan, akan mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena dengan keberadaan komite audit dapat memonitor tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019). Hasil penelitian Pitaloka dan Merkusiwati (2019), Kimsen *et al.* (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H2: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang disebabkan oleh pengaruh aktivitas operasional perusahaan sebagai kelangsungan hidup perusahaan kedepannya dengan bentuk pemberian bantuan atau solusi terkait dengan masyarakat sekitar (Maulinda dan Fidiana, 2019).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, dan pastinya akan mengurangi keuntungan perusahaan. Untuk dapat mengoptimalkan laba perusahaan, maka beberapa upaya untuk meminimalkan beban pajak dilakukan oleh perusahaan melalui penghindaran pajak (Wiratmoko, 2018).

Perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya memperhatikan pemegang saham saja, namun juga peduli terhadap pemangku kepentingan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan (Ryzki dan Fuadi, 2019).

Semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan akan terus berupaya untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan bertindak sesuai norma yang ada, mewujudkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang baik, dan patuh akan ketentuan pajak (Mulyani *et al.*, 2017). Hasil penelitian Dharma dan Noviyari (2017), Khairunisa *et al.* (2017), Mulyani *et al.* (2017), Maulinda dan Fidiana (2019) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H3: Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

RETURN ON ASSET DAN PENGHINDARAN PAJAK

Rasio untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan dapat ditunjukkan melalui *Return on Assets* (ROA). ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan aset yang efisien (Wiratmoko, 2018). Meningkatnya laba akan berpengaruh terhadap tingginya pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dengan meningkatnya laba, perusahaan tentu tidak ingin membayar pajak dalam jumlah yang besar, sehingga penghindaran pajak akan cenderung dilakukan oleh perusahaan (Wiratmoko, 2018).

Hasil *return on asset* yang positif menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. *Return on asset* memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan, sehingga semakin tinggi laba bersih perusahaan, maka akan semakin tinggi pula pajak yang dibayar oleh perusahaan (Ardianti, 2019).

Perusahaan dengan tingkat efisiensi serta pendapatan yang tinggi cenderung akan menghadapi pembayaran pajak yang rendah dikarenakan perusahaan dengan tingkat pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan insentif pajak dan pengurangan pajak lainnya (Fauzan *et al.*, 2019).

Semakin besar ROA yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin besar pula laba perusahaan sehingga akan menimbulkan beban pajak yang besar yang dapat mengurangi laba perusahaan, maka dari itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak agar perusahaan dapat memiliki laba yang maksimal (Primasari, 2019). Hasil penelitian Primasari (2019), Novriyanti dan Dalam (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H4: *Return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh melalui jumlah pertumbuhan penjualan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan, dapat membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak karena keuntungan yang diperoleh perusahaan akan semakin besar (Fauzan *et al.*, 2019).

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena rasio pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya yang dapat dilihat melalui perbandingan total penjualan secara keseluruhan dan menggambarkan persentase pertumbuhan penjualan pada setiap pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun (Widiayani *et al.*, 2019).

Apabila perusahaan memiliki tingkat penjualan yang baik dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajak akan cenderung meningkat dikarenakan penjualan yang meningkat menyebabkan laba ikut meningkat sehingga berdampak pada semakin tingginya pajak yang harus dibayar (Khomsiyah *et al.*, 2021).

Jika penjualan meningkat maka laba perusahaan juga ikut meningkat dan akan berdampak pada tingginya pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak (Faradilla dan Mildawati, 2021). Hasil penelitian Faradilla dan Mildawati (2021) serta Khomsiyah *et al.* (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H5: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

UKURAN PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

Firm size adalah skala atau ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total penjualan, total keseluruhan modal, nilai saham, jumlah aktiva, dan lain sebagainya. Semakin besar total aset maka menyebabkan ukuran perusahaan yang semakin besar sehingga perusahaan akan lebih banyak melakukan transaksi (Wiratmoko, 2018).

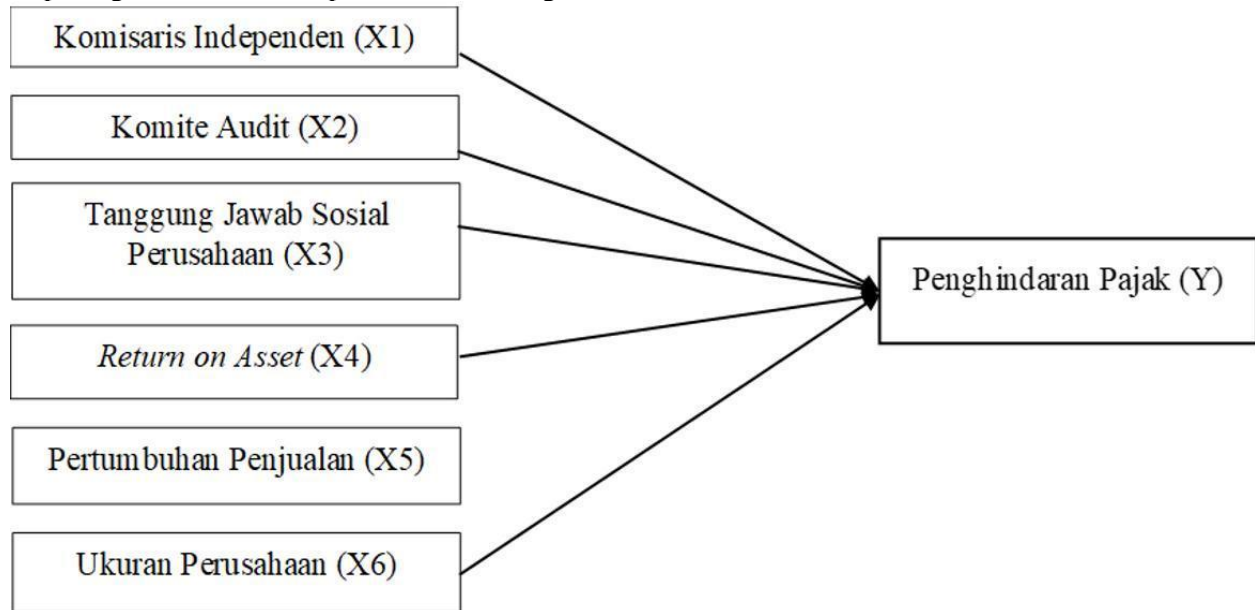
Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya. Perusahaan besar akan cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengelola pajak sehingga dapat menekan beban pajak perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dengan skala yang kecil (Sabita dan Mildawati, 2018).

Sumber daya yang ahli dalam perpajakan dapat mengelola pajak perusahaan secara maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan (Sabita dan Mildawati, 2018). Namun, perusahaan dengan skala besar akan menjadi sorotan oleh pemerintah (*regulator*) sehingga perusahaan besar akan menggunakan sumber dayanya secara optimal untuk melakukan perencanaan yang baik dan menaati aturan perpajakan yang berlaku (Kusufiyah dan Anggraini, 2019). Hasil penelitian Kusufiyah dan Anggraini (2019) serta

Suryani (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H6: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dapat digambarkan model penelitian ini sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan informasi yang didapat dari kelompok sasaran tertentu yang terbatas pada sasaran jenis-jenis tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka satu-satunya yang memiliki informasi yang diinginkan tersebut atau mereka sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran and Bougie 2016). Data dalam penelitian ini diuji dengan metode analisis regresi berganda. Berikut adalah kriteria pemilihan sampel penelitian:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Total Sampel
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020	161	483
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2017-2020 dan tidak berakhir pada 31 Desember	(7)	(21)
Perusahaan dengan nilai laba negatif pada tahun 2018-2020	(50)	(150)

Perusahaan dengan mata uang selain Rupiah	(32)	(96)
Perusahaan dengan nilai CETR $0 < \text{dan} > 1$	(13)	(39)
Total data yang digunakan dalam penelitian	59	177

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN PENGUKURANNYA PENGHINDARAN PAJAK

Penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak secara hukum yang tidak melanggar aturan perpajakan. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproses melalui i (CETR). Nilai CETR yang sesuai dengan kriteria penghindaran pajak yaitu perusahaan yang memiliki nilai CETR > 0 dan < 1 sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam sampel (Puspita dan Febrianti 2017). CETR diukur dengan skala rasio dengan pengukuran menurut Wiratmoko (2018) sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris independen bertugas untuk mengawasi perusahaan dengan baik dan membuat laporan keuangan perusahaan lebih objektif. Adanya komisaris independen di perusahaan diharapkan dapat meminimalkan kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Komisaris independen merupakan komisaris yang bukan bagian dari manajemen, mayoritas pemegang saham, pejabat atau yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan mayoritas pemegang saham sebuah perusahaan (Wiratmoko 2018). Komisaris independen diukur dengan skala rasio dengan pengukuran menurut Wiratmoko (2018) sebagai berikut:

$$\text{IC} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

KOMITE AUDIT

Fauzan *et al.* (2019) menyatakan komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dan perusahaan. Komite audit diukur dengan skala rasio dengan pengukuran menurut Fauzan *et al.* (2019) sebagai berikut:

$$\text{AC} = \frac{\text{Jumlah komite audit diluar dewan komisaris independen}}{\text{Total komite audit}}$$

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Menurut Wiratmoko (2018) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada ekonomi pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Pengukuran variabel CSR dilakukan dengan menggunakan *checklist* yang mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan nomor item perusahaan sebanyak 91 item. Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item di daftar periksa dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan yang dimana apabila item diungkapkan, maka nilainya adalah 1, dan apabila item I tidak diungkapkan, maka nilainya adalah 0 (Wiratmoko 2018). CSR diukur dengan skala rasio dengan pengukuran menurut Wiratmoko (2018) sebagai berikut:

$$CSR = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Note:

CSRIj: Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

$\sum X_{ij}$: Nilai 1 jika item i diungkapkan, nilai 0 jika item i tidak diungkapkan.

N_j : Jumlah item perusahaan, $n_j = 91$.

RETURN ON ASSET

Return on Asset adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Meningkatnya laba akan berpengaruh terhadap tingginya pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dengan meningkatnya laba, perusahaan tentu tidak ingin membayar pajak dalam jumlah yang besar, sehingga penghindaran pajak akan cenderung dilakukan oleh perusahaan (Wiratmoko 2018). ROA diukur dengan skala rasio dengan pengukuran menurut Wiratmoko (2018) sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

PERTUMBUHAN PENJUALAN

Pertumbuhan penjualan memiliki peran penting dalam pengelolaan modal kerja dan dapat menggambarkan baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh melalui jumlah pertumbuhan penjualan. Sales growth diukur dengan skala rasio dengan pengukuran menurut Fauzan et al. (2019) sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

UKURAN PERUSAHAAN

Ukuran perusahaan adalah skala atau ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total penjualan, total keseluruhan modal, nilai saham, jumlah aktiva, dan lain sebagainya. Semakin besar total aset maka menyebabkan ukuran perusahaan yang semakin besar sehingga perusahaan akan lebih banyak melakukan transaksi (Wiratmoko 2018). Ukuran perusahaan diukur dengan skala rasio dengan pengukuran menurut Fauzan et al. (2019) sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Log} (\text{total aset})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif adalah analisis statistik yang menggambarkan karakteristik dari variabel penelitian. Statistik deskriptif memberikan penggambaran atau deksripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali 2018). Hasil pengolahan uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	177	0,001665858	0,973809327	0,267231591	0,15723359
KI	177	0,285714286	0,833333333	0,416538875	0,10845498
KA	177	0,000000000	0,750000000	0,650659134	0,10425544
CSR	177	0,054945055	0,340659341	0,196560502	0,06025617
ROA	177	0,000281824	0,466601393	0,089974814	0,07937713
SG	177	-0,96254162	0,571361673	0,044148677	0,17888305
SIZE	177	11,27197435	14,54649084	12,51805727	0,68826456

Sumber : Pengolahan Data SPSS 25

Ghozali (2018) menyatakan uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil dari pengolahan uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	B	t	Sig.
KI	0,174	2,251	0,141
KA	-0,339	-1,393	0,003
CSR	-0,069	2,206	0,733
ROA	-0,314	-3,867	0,053
SG	-0,159	-4,107	0,015
SIZE	-0,005	-,2149	0,768

Sumber : Pengolahan Data SPSS 25

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Komisaris independen memiliki nilai sig. sebesar 0,141 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) tidak diterima. Artinya, komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

PENGARUH KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Komite audit memiliki nilai sig. sebesar $0,003 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya, komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil koefisien sebesar $-0,339$ menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap CETR. Rendahnya nilai CETR mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak. Banyaknya jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Komite audit di dalam perusahaan bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan telah berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan. Perusahaan dengan kegiatan operasional yang efektif dan efisien dapat meningkatkan laba perusahaan. Meningkatnya laba perusahaan membuat pembayaran pajak perusahaan semakin besar sehingga perusahaan akan mengambil tindakan untuk melakukan penghindaran pajak.

PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki nilai sig. sebesar $0,733 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) tidak diterima. Artinya, tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PENGARUH RETURN ON ASSET TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Return on asset memiliki nilai sig. sebesar $0,053 > 0,05$ artinya, *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis keempat (Ha4) yang menyatakan return on asset memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak tidak diterima.

PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Pertumbuhan penjualan memiliki nilai sig. sebesar $0,015 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) diterima. Artinya, pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien sebesar $-0,159$ menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap CETR. Rendahnya nilai CETR mengindikasikan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin besar. Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan menyebabkan laba perusahaan juga semakin tinggi. Besarnya laba perusahaan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak agar perusahaan dapat meminimalkan beban pajak untuk tetap mendapatkan laba yang besar.

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Ukuran perusahaan memiliki nilai sig. sebesar $0,768 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H6) tidak diterima. Artinya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa komisaris independen, tanggung jawab sosial perusahaan, *return on asset*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, komite audit dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingginya jumlah komite audit dalam suatu

perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan dapat memicu perusahaan untuk semakin melakukan penghindaran pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: (1) Nilai *Adjusted R Square* (R^2) dalam penelitian ini hanya sebesar 10,5%, sehingga masih terdapat banyak variabel independen lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang tidak terdapat dalam penelitian ini. (2) Periode penelitian hanya tiga tahun.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu: (1) Menambah variabel independen lainnya yang dapat menjelaskan pengaruh terhadap penghindaran pajak yang tidak digunakan dalam model penelitian ini, seperti leverage, umur perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan institusional. (2) Memperpanjang periode penelitian menjadi lebih dari tiga tahun.

REFERENSI

- Faradilla, Riska Novia, and Titik Mildawati. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Tax Avoidance." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10.
- Fauzan, Fauzan, Dyah Ayu Ayu, and Nashirotn Nisa Nurharjanti. 2019. "The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>.
- Ghozali, Imam. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9." In *Universitas Diponegoro*.
- Hapsari Ardianti, Putu Novia. 2019. "Profitabilitas, Leverage, Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>.
- Khomsiyah, Nurul, Ninnasi Muttaqin, and Puspadam Katias. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018." *Jurnal Ecopreneur*. 12 4 (1): 1–19.
- Kusufiyah, Yunita Valentina, and Dina Anggraini. 2019. "Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 26: 1601. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p28>.
- Maulinda, Indah Pramesty, and Fidiana. 2019. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Mulyani, Sri, Kusmuriyanto, and Trisni Suryarini. 2017. "Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indoensia." *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*.
- Pandia, Sonya Enda Natasha S, Evi Juita Wailan'An, and Anita Tarihoran. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015." *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*.
- Pitaloka, Syifa, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiawati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>.
- Pratomo, Dudi, and Risa Aulia Rana. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.

- Primasari, N H. 2019. "... Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Puspita, Deanna, and Meiriska Febrianti. 2017. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Rani, Puspita. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Ryzki, M. Qyas Aulia, and Raida Fuadi. 2019. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Sabita, Johan Hayan, and Titik Mildawati. 2018. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Sunarsih, Ni Putu Ayu Widiyani Ni Made, and Ni Putu Shinta Dewi. 2019. "Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance." *KUMPULAN HASIL RISET MAHASISWA AKUNTANSI (KHARISMA)*.
- Suryani, Suryani. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>.
- Triyuwono, Edwin. 2018. "Proses Kontrak, Teori Agensi, dan Corporate Governance (*Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance*)." SSRN Electronic Journal.
- Uma Sekaran, and Roger Bougie. 2016. "Research Method for Business Textbook (A Skill Building Appra)." *United States: John Wiley & Sons Inc*.
- Wiratmoko, Sandhi. 2018. "The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance." *The Indonesian Accounting Review*. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>